P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

TRANSFORMASI DIGITAL PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI BERBASIS SISKEUDES: STUDI KUALITATIF DI NEGERI KAILOLO

Nur Hikmah Helida Amahoru[1)], Marannu Paledung[2)], Muh Ziaul Haq Bakri[3)]
[1,2,3)]Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura
email: nur.amahoru@lecturer.unpatti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) serta memahami peran kompetensi sumber daya manusia dan literasi digital dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilaksanakan pada Maret–April 2026. Informan berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposif, terdiri atas unsur pemerintah negeri, operator SISKEUDES, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa SISKEUDES membantu penataan administrasi, penginputan dan penyimpanan data, serta penyusunan laporan. Manfaat tersebut didukung oleh pembagian tugas, pengalaman kerja, dan pelatihan aparatur, meskipun kendala jaringan dan kebutuhan peningkatan kapasitas masih ditemukan. Pada sisi publik, informasi anggaran tersedia melalui media informasi, tetapi pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam mengakses informasi belum seragam. Penelitian menyimpulkan adanya kesenjangan antara digitalisasi administrasi internal dan transparansi substantif kepada masyarakat.
Kata kunci: SISKEUDES; *kompetensi SDM; literasi digital; akuntabilitas; transparansi.*

Abstract

This study describes the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) and explores how human resource competence and digital literacy support accountability and transparency in financial management in Negeri Kailolo. A descriptive qualitative approach was used, and the study was conducted from March to April 2026. Ten informants were purposively selected from the village government, SISKEUDES operator, Village Consultative Body (BPD), and community representatives. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that SISKEUDES supports administrative organization, data entry and storage, and financial reporting. These benefits are associated with task allocation, work experience, and staff training, although network limitations and the need for further capacity building remain. For the public, budget information is available through information boards, but community awareness and access to financial information vary. The study concludes that a gap remains between the digitization of internal administration and substantive transparency to the community.
Keywords: *SISKEUDES; human resource competence; digital literacy; accountability; transparency*.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pengelolaan tersebut dituntut untuk dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik untuk

mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut dituntut untuk dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa (Manik et al., n.d.).

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan dalam tata kelola keuangan desa melalui digitalisasi. Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penerapan SISKEUDES dapat membantu meningkatkan keteraturan administrasi, efisiensi pengelolaan, kualitas pelaporan, serta akuntabilitas keuangan desa (Sari et al., 2025; Zuliati et al., 2025; Khasanah & Rodiyah, 2025). Dengan demikian, SISKEUDES tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari proses transformasi digital tata kelola keuangan desa. Perspektif ini sejalan dengan pemahaman transformasi digital sektor publik sebagai perubahan organisasi dan proses kerja yang melampaui sekadar penggunaan teknologi (Mergel et al., 2019).

Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dan penggunaan aplikasi. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penting karena aparatur desa harus mampu memahami prosedur pengelolaan keuangan sekaligus mengoperasikan sistem secara tepat. Penelitian Sari et al. (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi SDM dan pelatihan masih menjadi kendala dalam penerapan SISKEUDES. Sementara itu, Papra dan Inapty (2024) menemukan bahwa penggunaan SISKEUDES dan kompetensi SDM berhubungan dengan kualitas laporan keuangan desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat teknologi sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan aparatur yang menggunakannya.

Selain kompetensi SDM, literasi digital menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan penerapan SISKEUDES. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga kemampuan memahami, mengelola, dan memanfaatkan informasi yang dihasilkan melalui teknologi digital. Nurfitria dan Kamela (2026) menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan SISKEUDES dipengaruhi oleh keterampilan aparatur, pemahaman terhadap sistem, kemampuan beradaptasi dengan digitalisasi, serta dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, transformasi digital dalam tata kelola keuangan desa membutuhkan keseimbangan antara kesiapan SDM, literasi digital, dan dukungan teknologi. Temuan mengenai kendala adaptasi aparatur dan dukungan infrastruktur juga dilaporkan oleh Khasanah dan Rodiyah (2025) serta Rahmawati et al. (2024).

Di sisi lain, digitalisasi pengelolaan keuangan desa perlu diikuti dengan peningkatan transparansi kepada masyarakat. Penggunaan SISKEUDES dapat membantu pemerintah desa menghasilkan pencatatan dan laporan keuangan yang lebih terstruktur, tetapi keberadaan sistem tersebut belum secara otomatis menjamin masyarakat memperoleh informasi keuangan secara memadai. Zuliati et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan media informasi dan belum optimalnya mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana akuntabilitas administratif yang dihasilkan melalui sistem dapat diterjemahkan menjadi transparansi informasi yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks Negeri Kailolo yang telah menerapkan SISKEUDES dan secara umum penggunaannya telah berjalan dengan baik.

Meskipun demikian, informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat masih perlu diperkuat. Selain itu, kondisi geografis Negeri Kailolo yang relatif jauh dari pusat kota menyebabkan konektivitas internet menjadi salah satu kendala dalam mendukung penggunaan teknologi digital. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan jaringan dan infrastruktur dapat memengaruhi kelancaran penerapan SISKEUDES (Khasanah & Rodiyah, 2025; Nurfitria & Kamela, 2026).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas efektivitas SISKEUDES, pengaruh penggunaannya terhadap kualitas laporan keuangan, serta kontribusinya terhadap akuntabilitas dan transparansi (Mardaw et al., 2022; Papra & Inapty, 2024; Rahmawati et al., 2024; Zuliati et al., 2025). Namun, masih diperlukan kajian yang melihat proses transformasi digital tata kelola keuangan secara lebih kontekstual, khususnya dengan menghubungkan kompetensi SDM, literasi digital, kondisi infrastruktur, serta praktik akuntabilitas dan transparansi dalam satu konteks pemerintahan desa. Dalam konteks tersebut, Negeri Kailolo menjadi penting untuk dikaji karena memiliki karakteristik penggunaan SISKEUDES yang telah berjalan, tetapi masih menghadapi persoalan keterbukaan informasi dan keterbatasan konektivitas. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas efektivitas SISKEUDES, kualitas laporan keuangan, serta akuntabilitas dan transparansi, masih diperlukan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana manfaat administrasi internal berhubungan dengan pengalaman masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan. Kajian ini mengisi ruang tersebut melalui studi kualitatif di Negeri Kailolo dengan menelaah secara bersamaan kompetensi aparatur, literasi digital, dukungan infrastruktur, akuntabilitas administratif, serta akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi anggaran. Kebaruan penelitian terletak pada identifikasi kesenjangan antara ketersediaan informasi secara formal dan keterjangkauan informasi secara substantif, bukan pada klaim bahwa penggunaan SISKEUDES secara otomatis meningkatkan seluruh aspek akuntabilitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana kompetensi SDM dan literasi digital berperan dalam penerapan SISKEUDES serta bagaimana penerapannya mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo. Informan penelitian terdiri atas 10 orang, yaitu Kepala Negeri, Sekretaris Negeri, Kaur Keuangan, Bendahara, Operator SISKEUDES, satu anggota BPD, dan empat tokoh masyarakat. Keterlibatan aparatur pemerintah negeri, BPD, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan SISKEUDES, kesiapan SDM, literasi digital, kendala jaringan, serta praktik penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat. Pendekatan ini sesuai untuk mengeksplorasi pengalaman dan pemaknaan partisipan dalam konteks tertentu (Creswell & Poth, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran kompetensi sumber daya manusia dan literasi digital dalam penerapan SISKEUDES serta kontribusinya terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo.

2. TELAAH LITERATUR

2.1. *Good Governance*

Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (World Bank, 1992). Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip ini menuntut pemerintah desa untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik sekaligus menyediakan informasi keuangan yang dapat diakses masyarakat.

Dalam penelitian ini, Good Governance digunakan sebagai landasan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan kepada pemerintah, tetapi juga kemampuan pemerintah negeri mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan kemudahan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan.

2.2. *DeLone and McLean Information Systems Success Model*

DeLone dan McLean (1992, 2003) menjelaskan keberhasilan sistem informasi melalui beberapa aspek, antara lain kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, model tersebut digunakan sebagai perspektif untuk memahami keberhasilan penerapan SISKEUDES, terutama dari aspek kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, dan manfaatnya bagi pengelolaan keuangan desa.

SISKEUDES membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, keberhasilan penggunaannya tidak hanya ditentukan oleh aplikasi, tetapi juga oleh kompetensi SDM, literasi digital, serta dukungan infrastruktur dan jaringan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SISKEUDES dapat meningkatkan keteraturan administrasi, efisiensi, kualitas laporan, serta akuntabilitas, meskipun masih terdapat kendala dalam kompetensi aparatur, pelatihan, infrastruktur, dan transparansi informasi kepada masyarakat (Mardaw et al., 2022; Sari et al., 2025; Zuliati et al., 2025; Khasanah & Rodiyah, 2025; Nurfitria & Kamela, 2026).

2.3. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

SISKEUDES merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara terintegrasi. Penerapannya membantu pemerintah desa melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara lebih terstruktur sehingga dapat mendukung efisiensi dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, SISKEUDES dipandang sebagai instrumen transformasi digital tata kelola keuangan, bukan sekadar alat administrasi. Keberhasilannya dilihat dari kemampuan sistem dalam mendukung proses pengelolaan keuangan serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.

2.4. Kompetensi SDM dan Literasi Digital

Kompetensi SDM merupakan kemampuan aparatur dalam memahami dan melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, termasuk kemampuan menggunakan SISKEUDES. Sementara itu, literasi digital berkaitan dengan kemampuan menggunakan, memahami, mengelola, dan memanfaatkan teknologi serta informasi digital.

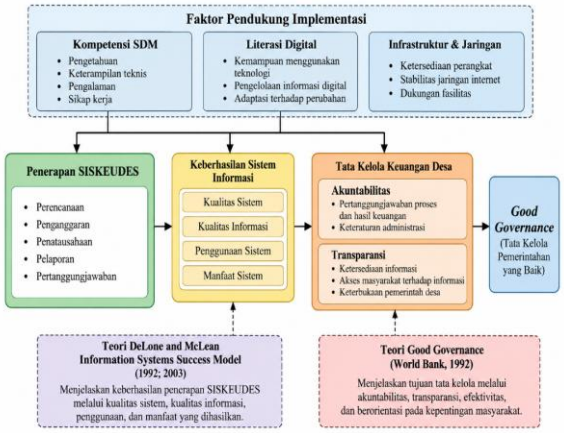
Kedua aspek tersebut penting karena penggunaan SISKEUDES membutuhkan aparatur yang mampu mengoperasikan sistem, mengelola data, memahami informasi yang dihasilkan, serta beradaptasi dengan perubahan proses kerja berbasis digital. Keterbatasan kompetensi dan kemampuan digital dapat menghambat optimalisasi penggunaan SISKEUDES (Sari et al., 2025; Nurfitria & Kamela, 2026).

2.5. Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses masyarakat. SISKEUDES dapat mendukung akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih sistematis. Namun, keberadaan informasi dalam sistem belum secara otomatis menjamin transparansi kepada masyarakat. Pemerintah

desa tetap perlu menyediakan media dan mekanisme penyampaian informasi yang mudah diakses masyarakat (Zuliati et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini membedakan akuntabilitas administratif dengan transparansi publik sebagai dua aspek penting dalam tata kelola keuangan desa.

2.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses transformasi tata kelola keuangan berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), khususnya terkait kompetensi sumber daya manusia, literasi digital, kondisi infrastruktur dan jaringan, serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami proses dan konteks sosial secara mendalam (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan atau pengaruh antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memperoleh pemahaman mengenai pengalaman, praktik, kendala, dan persepsi para pihak yang terlibat dalam penerapan SISKEUDES.

3.2. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Negeri Kailolo pada Maret–April 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi bahwa pemerintah Negeri Kailolo telah menerapkan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan. Meskipun penerapan sistem secara umum telah berjalan, masih terdapat persoalan terkait keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat serta kendala konektivitas internet yang berkaitan dengan kondisi geografis wilayah.

Objek penelitian adalah transformasi tata kelola keuangan berbasis SISKEUDES, dengan fokus pada:

1. penerapan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan;
2. kompetensi sumber daya manusia;
3. literasi digital aparatur;
4. kondisi infrastruktur dan jaringan;
5. akuntabilitas pengelolaan keuangan;
6. transparansi informasi keuangan kepada Masyarakat.

3.3. Informan Peneliti

Informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, fungsi, atau keterlibatan yang relevan dengan pengelolaan keuangan dan penerapan SISKEUDES di Negeri Kailolo. Sepuluh informan mencakup enam informan internal/kelembagaan dan empat tokoh masyarakat. Kepala Negeri dipilih karena memahami kebijakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan; Sekretaris Negeri karena menjalankan koordinasi administrasi; Kaur Keuangan dan bendahara karena terlibat langsung dalam penatausahaan serta administrasi transaksi; operator SISKEUDES karena menginput dan mengelola data aplikasi; anggota BPD karena menjalankan fungsi pengawasan dan mewakili aspirasi masyarakat; sedangkan empat tokoh masyarakat dipilih untuk menangkap variasi pengalaman warga mengenai sosialisasi, akses informasi, transparansi, dan partisipasi. Komposisi ini memungkinkan triangulasi

perspektif antara pihak yang mengelola sistem, pihak yang mengawasi, dan pihak yang menerima informasi publik. Empat tokoh masyarakat tidak diperlakukan sebagai representasi statistik seluruh warga, melainkan sebagai sumber informasi kualitatif untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat.

Tabel. 1 Informan Peneliti

Kode	Informan	Jumlah	Pertimbangan
P1	Kepala Negeri	1	Memahami kebijakan dan tata kelola pemerintahan serta keuangan negeri
P2	Sekretaris Negeri	1	Memahami administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan
P3	Kaur Keuangan	1	Terlibat dalam pengelolaan keuangan negeri
P4	Bendahara	1	Terlibat langsung dalam administrasi dan transaksi keuangan
P5	Operator SISKEUDES	1	Mengoperasikan aplikasi dan mengelola data dalam SISKEUDES
P6	Anggota BPD	1	Memiliki fungsi pengawasan dan keterwakilan masyarakat
P7-P10	Tokoh masyarakat	4	Memberikan perspektif masyarakat mengenai transparansi dan akses informasi
Total		10	

Komposisi informan tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif yang berbeda antara pemerintah negeri, pengelola sistem, lembaga pengawasan, dan masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada 10 informan. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai:

   - Penerapan SISKEUDES;
   - Kemampuan aparatur dalam menggunakan SISKEUDES;
   - Pengalaman dan kemampuan digital aparatur;
   - Manfaat SISKEUDES terhadap pengelolaan keuangan;
   - Kendala penggunaan sistem;
   - Kondisi jaringan internet dan infrastruktur;
   - Proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
   - Mekanisme penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat;
   - Persepsi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan keuangan.

   Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sama, tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan kondisi yang mereka hadapi secara lebih mendalam.

2. Observasi

   Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi penerapan SISKEUDES dan lingkungan pendukungnya. Observasi mencakup proses penggunaan sistem, kondisi perangkat, ketersediaan fasilitas pendukung, kondisi jaringan internet, serta

media yang digunakan pemerintah negeri dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

3. Dokumentasi
   Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang relevan meliputi dokumen pengelolaan keuangan, laporan yang dihasilkan melalui SISKEUDES, dokumen atau media informasi keuangan kepada masyarakat, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan penerapan SISKEUDES.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahapan ini mengikuti kerangka analisis data kualitatif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014).

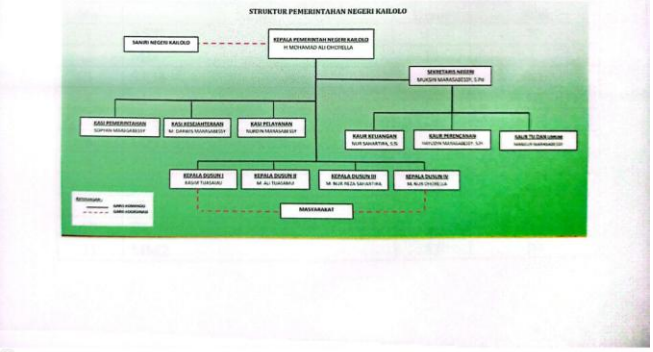
1. Reduksi Data
   Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Informasi kemudian dikategorikan ke dalam tema:
   - Penerapan SISKEUDES;
   - Kompetensi SDM;
   - Literasi digital;
   - Infrastruktur dan jaringan;
   - Akuntabilitas; dan
   - Transparansi.
2. Penyajian Data
   Data yang telah dikelompokkan disajikan dalam bentuk uraian naratif dan matriks tematik untuk melihat pola, persamaan, perbedaan, serta hubungan antartemuan dari masing-masing informan.
3. Penarikan Kesimpulan
   Kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola dan tema yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan kemudian dikaitkan dengan DeLone and McLean Information Systems Success Model dan prinsip Good Governance untuk menjelaskan bagaimana penerapan SISKEUDES berkontribusi terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini tidak mengukur efektivitas melalui indikator kuantitatif atau menguji hubungan sebab-akibat; istilah manfaat/dukungan SISKEUDES digunakan untuk merangkum persepsi informasi dan bukti dokumentasi yang tersedia.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Negeri Kailolo

Negeri Kailolo merupakan salah satu negeri yang berada di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negeri Kailolo memiliki struktur pemerintahan yang terdiri atas Kepala Pemerintahan Negeri, Sekertaris Negeri, Perangkat yang menangani bidang Pemerintahan, kesejahteraan pelayanan, keuangan, perencanaan, serta kepala dusun dan masyarakat.

Gambar 2. Struktur Pemerintahan Negeri Kailolo



Gambar 1 Struktur Pemerintahan Negeri Kailolo

Berdasarkan dokumentasi struktur pemerintahan yang diperoleh peneliti, fungsi pengelolaan keuangan berada dalam struktur pemerintahan negeri dan didukung oleh perangkat yang memiliki tugas terkait keuangan dan perencanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan Negeri Kailolo.

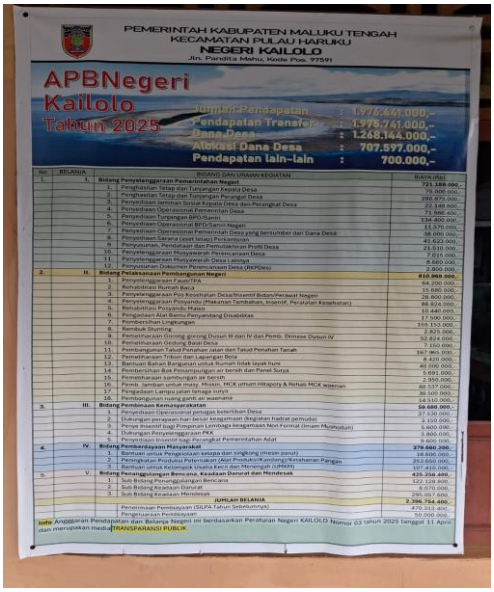
Dari sisi pengelolaan keuangan, dokumentasi lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Negeri Kailolo telah menyediakan

informasi APB Negeri kepada masyarakat melalui media informasi yang ditempatkan di lingkungan kantor pemerintahan negeri. Pada APB Negeri Kailolo Tahun 2025 tercantum total pendapatan sebesar Rp1.976.441.000, yang terdiri atas pendapatan transfer sebesar Rp1.975.741.000, Dana Desa sebesar Rp1.268.144.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp707.597.000, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp700.000. Total belanja yang tercantum sebesar Rp2.396.754.400. Informasi tersebut menunjukkan bahwa secara formal pemerintah negeri telah menggunakan media publikasi untuk menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat.

Dokumentasi realisasi APB Negeri Tahun Anggaran 2024 juga menunjukkan adanya publikasi informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja. Pada bagian bawah media informasi tersebut dinyatakan bahwa informasi realisasi APB Negeri merupakan media transparansi publik.



Gambar 2. Media Transparansi Pengelolaan Keuangan Negeri Kailolo tahun 2024



Gambar 2. Media Transparansi Pengelolaan Keuangan Negeri Kailolo tahun 2025

Temuan dokumentasi tersebut menjadi penting ketika dibandingkan dengan hasil wawancara masyarakat. Meskipun media informasi telah tersedia, sebagian informan masyarakat menyatakan belum mengetahui penggunaan SISKEUDES dan belum memperoleh informasi keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, persoalan transparansi di Negeri Kailolo bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya media informasi, tetapi juga menyangkut akses, penyampaian, komunikasi, dan pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut.

4.2. Gambaran Umum Penerapan SISKEUDES di Negeri Kailolo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Negeri Kailolo telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mendukung pengelolaan keuangan. Penerapan sistem tersebut didukung oleh pembagian tugas antara Kepala Negeri, Sekretaris Negeri, Kaur Keuangan, Bendahara, dan Operator SISKEUDES. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam proses pengelolaan dan administrasi keuangan negeri.

Hasil wawancara dengan informan internal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan berdasarkan pembagian tugas. Kepala Negeri menyatakan:

Pada dokumen hasil wawancara terbaru yang dilampirkan, bagian jawaban P1 (Kepala Negeri) memberikan pernyataan yang menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES telah ditempatkan dalam struktur kerja pemerintahan negeri, bukan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang secara keseluruhan. Kaur Keuangan dan Bendahara menjalankan fungsi pengelolaan dan penatausahaan keuangan, sedangkan Operator SISKEUDES berperan dalam pengelolaan aplikasi dan penyusunan laporan.

Operator SISKEUDES menjelaskan bahwa pada tahap awal penggunaan sistem masih ditemukan kesalahan dalam proses input, tetapi kondisi tersebut mengalami perbaikan setelah adanya pelatihan dan pendampingan:

Operator SISKEUDES menjelaskan ruang lingkup pekerjaannya: "Tugas saya adalah memasukkan dan mengelola data yang diperlukan dalam sistem serta membantu proses pelaporan." (P5). Ia juga menyatakan bahwa "ketepatan laporan sangat bergantung pada ketepatan data yang dimasukkan" (P5). Kedua pernyataan ini menegaskan bahwa operator bukan hanya menjalankan aplikasi, tetapi juga berperan penting menjaga mutu data yang menjadi dasar laporan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES telah berkembang melalui proses pembelajaran dan pengalaman aparatur. Dengan demikian, keberadaan aplikasi saja belum cukup; manfaat sistem sangat bergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami prosedur dan mengoperasikannya.

4.3. Kompetensi SDM dalam Implementasi SISKEUDES

Kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian. Berdasarkan uraian wawancara P2–P5 yang tersedia, kompetensi aparatur tercermin melalui pemahaman terhadap prosedur pengelolaan keuangan, kemampuan melakukan input, pemeriksaan dokumen, pengalaman, serta pelatihan. Bagian jawaban P1 dalam dokumen hasil wawancara terbaru belum terisi, sehingga analisis kutipan langsung pada bagian ini dibatasi pada informan yang jawabannya tersedia.

Wawancara P3, P4, dan P5 memperlihatkan bahwa kompetensi teknis berkaitan dengan pemahaman prosedur, pemeriksaan data, dan ketelitian input. P3 menjelaskan: "Saya mengatasi kendala dengan melakukan pengecekan ulang dan berkoordinasi dengan operator atau pendamping." (P3). Sementara itu, P4 menyatakan bahwa "pengalaman sangat membantu meningkatkan ketelitian dalam bekerja" (P4). Dari sisi operator, pelaporan yang tepat juga mensyaratkan input yang benar: "Ketepatan laporan sangat bergantung pada ketepatan data yang dimasukkan." (P5).

Rangkaian informasi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi dalam penerapan SISKEUDES tidak hanya berupa kemampuan teknis mengoperasikan aplikasi. Kompetensi juga mencakup pemahaman terhadap prosedur, ketelitian dalam memasukkan data, pengalaman, dan kemampuan mengikuti perubahan sistem.

Pengalaman operator menunjukkan bahwa keterampilan penggunaan sistem berkembang melalui praktik dan dukungan pelatihan. P5 menyatakan: "Pelatihan sangat membantu saya memahami fitur-fitur aplikasi." (P5), tetapi ia menegaskan bahwa "pelatihan lanjutan tetap diperlukan" (P5). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kompetensi digital bukan kondisi yang selesai setelah satu kali pelatihan, melainkan perlu diperbarui ketika aplikasi dan kebutuhan kerja berubah.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Papra dan Inapty (2024) yang menunjukkan pentingnya kompetensi SDM dalam mendukung kualitas pengelolaan laporan keuangan desa. Namun, penelitian ini memberikan tambahan perspektif bahwa kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kualitas output laporan, tetapi juga dengan proses adaptasi aparatur terhadap digitalisasi pengelolaan keuangan.

Dalam konteks DeLone dan McLean, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh penggunaan sistem dan manfaat yang diperoleh pengguna (DeLone & McLean, 2003). SISKEUDES memberikan manfaat lebih besar ketika aparatur mampu menggunakannya secara tepat.

4.4. Literasi Digital dalam Penggunaan SISKEUDES

Literasi digital aparatur terlihat dari kemampuan menggunakan komputer, menyimpan dokumen dalam bentuk digital, menggunakan aplikasi, serta mengelola informasi keuangan secara elektronik.

Sekretaris Negeri menjelaskan:

Sekretaris Negeri menjelaskan manfaat sistem bagi pekerjaan administrasi: "SISKEUDES mempermudah pengelolaan data karena informasi menjadi lebih terstruktur, membantu mempercepat penyusunan laporan, dan mengurangi pekerjaan manual." (P2). Ia juga mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi, yaitu "perubahan sistem, jaringan, dan penyesuaian terhadap fitur aplikasi" (P2). Dengan demikian, manfaat digitalisasi tetap bergantung pada kesiapan pengguna dan dukungan infrastruktur.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah memberikan perubahan pada proses administrasi internal. Dokumen yang sebelumnya lebih bergantung pada bentuk fisik kini semakin banyak disimpan secara digital sehingga lebih mudah dicari dan digunakan kembali.

Hasil observasi juga memperkuat temuan tersebut. Pemanfaatan perangkat digital terlihat lebih dominan dalam kegiatan administrasi internal, khususnya penyimpanan dan pengelolaan dokumen keuangan.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa literasi digital aparatur tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi literasi digital untuk komunikasi publik. Teknologi telah digunakan untuk membantu aparatur mengelola data, tetapi pemanfaatan kanal digital untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat masih terbatas.

Kondisi ini menjadi salah satu temuan penting karena memperlihatkan bahwa transformasi digital di Negeri Kailolo lebih maju pada digitalisasi proses internal dibandingkan digitalisasi informasi publik.

Dalam perspektif DeLone dan McLean (2003), kondisi tersebut menunjukkan adanya manfaat sistem pada pengguna internal, tetapi manfaat sistem belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi manfaat yang dapat dirasakan oleh pengguna eksternal, yaitu masyarakat.

4.5. Efektivitas Administrasi melalui SISKEUDES

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SISKEUDES mendukung proses administrasi keuangan melalui penginputan transaksi, pengelompokan berdasarkan kode anggaran, penyimpanan dokumen, serta penyusunan laporan.

P3, P4, dan P5 memberikan informasi yang konsisten mengenai pentingnya ketepatan input, kelengkapan bukti transaksi, dan pemeriksaan data sebelum laporan disusun. P3 menyatakan bahwa "manfaat utama SISKEUDES adalah membantu penatausahaan dan pelaporan serta meningkatkan ketepatan laporan" (P3). P4 menjelaskan bahwa "SISKEUDES membantu pencatatan dan pelaporan" (P4), sedangkan P5 menegaskan bahwa "sistem membantu mempercepat proses penyusunan laporan apabila data yang dimasukkan sudah benar" (P5). Kutipan ini memperlihatkan bahwa manfaat sistem terkait erat dengan kualitas data yang dimasukkan oleh pengguna.

Temuan tersebut diperkuat oleh dokumentasi APB Negeri Kailolo Tahun 2025 dan dokumen realisasi APB Negeri Tahun Anggaran 2024 yang menunjukkan tersedianya informasi mengenai pendapatan, belanja, bidang kegiatan, serta realisasi anggaran.

Berdasarkan dokumentasi tersebut, APB Negeri Kailolo Tahun 2025 mencatat total pendapatan sebesar Rp1.976.441.000, sedangkan belanja tercatat sebesar Rp2.396.754.400. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa bidang, antara lain penyelenggaraan pemerintahan negeri, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

Dokumentasi tersebut tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi telah benar secara audit, tetapi menjadi bukti bahwa informasi penganggaran dan realisasi telah didokumentasikan dan dipublikasikan.
Dengan demikian, temuan penelitian lebih tepat menyatakan bahwa SISKEUDES mendukung keteraturan administrasi dan akuntabilitas internal, bukan bahwa SISKEUDES secara otomaris menjamin seluruh aspek akuntabilitas.

4.6. Kendala Infrastruktur dan Jaringan

Meskipun SISKEUDES telah digunakan, pemanfaatan teknologi masih dipengaruhi kondisi jaringan dan dukungan teknis. Sekretaris Negeri menyebut kendala yang "berkaitan dengan perubahan sistem, jaringan, dan penyesuaian terhadap fitur aplikasi" (P2). Operator juga menyatakan bahwa "kendala biasanya berupa jaringan, perubahan sistem, dan kesalahan input" (P5). Kesamaan keterangan ini memperlihatkan bahwa kendala tidak hanya bersifat teknis pada aplikasi, tetapi juga terkait konektivitas dan ketelitian pengguna.

Kendala jaringan menjadi relevan karena proses pengelolaan berbasis digital membutuhkan konektivitas yang stabil. Kondisi geografis Negeri Kailolo sebagai wilayah kepulauan menyebabkan akses internet menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan transformasi digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem digital tidak hanya membutuhkan aplikasi dan aparatur yang mampu menggunakannya, tetapi juga lingkungan teknologi yang mendukung.
Dalam kerangka DeLone dan McLean, kualitas sistem dan manfaat sistem perlu dilihat bersama dengan kondisi penggunaan aktual. Ketika jaringan mengalami gangguan, kemampuan sistem untuk memberikan manfaat secara optimal juga dapat terganggu.

Dengan demikian, infrastruktur dan jaringan merupakan kondisi pendukung penting dalam keberhasilan transformasi digital pengelolaan keuangan Negeri Kailolo.

4.7. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SISKEUDES mendukung akuntabilitas terutama pada aspek administratif. Pembagian tugas, pencatatan transaksi, penggunaan bukti transaksi, pemeriksaan data, penyimpanan dokumen, dan penyusunan laporan merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban. P3 menyatakan bahwa "data yang dimasukkan menjadi dasar penyusunan laporan, sehingga administrasi lebih cepat dan terstruktur" (P3). Sejalan dengan itu, P4 menjelaskan bahwa "laporan yang dihasilkan sistem lebih mudah ditelusuri" (P4). Temuan ini menunjukkan dukungan SISKEUDES pada keterlacakan administrasi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh proses keuangan telah bebas dari kesalahan.

Dari sisi dokumentasi, tersedianya APB Negeri dan realisasi APB Negeri menunjukkan bahwa pemerintah negeri memiliki informasi yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas administratif belum sepenuhnya identik dengan transparansi public, artinya SISKEUDES membantu pencatatan dan pelaporan akan tetapi pencatatan dan pelaporan belum otomatis membuat Masyarakat memahami informasi keuangan secara baik. Perbedaan tersebut menjadi salah satu temuan utama penelitian.

4.8. Transparansi Pengelolaan Keuangan Kepda Masyarakat

Temuan mengenai transparansi merupakan bagian paling penting dari penelitian ini karena terdapat perbedaan antara perspektif pemerintah dan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa Pemerintah Negeri Kailolo telah menyediakan informasi APB Negeri dan realisasi APB Negeri melalui papan/spanduk informasi yang ditempatkan di lingkungan kantor negeri.

Dengan demikian, tidak tepat apabila dikatakan bahwa Pemerintah Negeri Kailolo tidak menyediakan informasi keuangan. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan media informasi tersebut belum sepenuhnya membuat masyarakat memahami sistem dan pengelolaan keuangan negeri.

Tokoh masyarakat P7 menyatakan:

Dalam dokumen wawancara masyarakat yang digunakan pada naskah sebelumnya, P7 memberikan jawaban singkat, “Tidak.” (P7), ketika ditanya mengenai pengetahuannya tentang SISKEUDES. Karena jawaban tersebut sangat ringkas, maknanya perlu dibaca secara terbatas: jawaban itu menunjukkan bahwa P7 menyatakan tidak mengetahui SISKEUDES, bukan bukti bahwa seluruh masyarakat memiliki pengetahuan yang sama.

P8 memberikan penjelasan yang lebih tegas: P8 menyampaikan keterbatasan informasi yang diterimanya: “Kami tidak tau apakah adanya pengunaan SISKEUDES di desa kailolo karena belum ada sosialisasi terkait SISKEUDES di desa Kailolo.” (P8). Ejaan kutipan dipertahankan sesuai dokumen sumber agar tidak mengubah bentuk pernyataan informan. Secara analitis, pernyataan ini mengarah pada kebutuhan sosialisasi mengenai sistem, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak ada publikasi anggaran sama sekali.

Di sisi lain, P9 memberikan perspektif yang berbeda: Sebaliknya, P9 menyebut media informasi yang tersedia: “dapat diakses atau dilihat pada papan Informasi yang berada pada kantor pemerintah negeri Desa Kailolo.” (P9). Pernyataan ini konsisten dengan hasil observasi mengenai papan informasi di kantor negeri. Namun, keberadaan media tersebut belum menjelaskan apakah informasi dapat dijangkau oleh semua warga atau dipahami secara memadai.

Sementara P10 menyampaikan harapan masyarakat: P10 menekankan harapan terhadap pengelolaan yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat: “Harapan kami pengelolaan keuangan desa sesuai dan berjalan pada semestinya. Harapan kami pengelolaan keuangan desa melibatkan semua elemen masyarakat. Harapan kami dengan pengelolaan keuangan desa, tepat sasaran dan sesuai dengan kebermanfaatan masyarakat.” (P10). Pernyataan ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat tidak terbatas pada publikasi angka anggaran, tetapi juga mencakup pelibatan warga dan manfaat nyata dari penggunaan keuangan negeri.

Keempat perspektif tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak memberikan jawaban yang seragam. P7 dan P8 menunjukkan keterbatasan pengetahuan mengenai SISKEUDES dan sosialisasi. P9 mengakui bahwa informasi tersedia melalui papan informasi. Sementara P10 menekankan kebutuhan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa transparansi sama sekali tidak ada, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan informasi dan keterjangkauan informasi oleh masyarakat.

4.9. Transparansi formal dan Transparansi subtantif

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, transparansi pengelolaan keuangan Negeri Kailolo dapat dibedakan menjadi dua bentuk.

Tabel 2. Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negeri Kailolo

Aspek	Temuan
Ketersediaan informasi	APB Negeri 2025 dan realisasi APB Negeri 2024 tersedia
Media informasi	Papan/spanduk informasi di kantor negeri
Akses fisik	Masyarakat dapat melihat informasi di kantor
Sosialisasi SISKEUDES	Sebagian informan masyarakat belum mengetahui SISKEUDES
Akses informasi rinci	Belum sepenuhnya aktif dan mudah diperoleh
Media digital publik	Belum ditemukan bukti penggunaan kanal digital resmi secara optimal
Partisipasi masyarakat	Lebih terlihat pada tahap perencanaan/Musrenbang
Pengawasan berkelanjutan	Masih perlu diperkuat

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 2026.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Negeri Kailolo telah menjalankan transparansi formal melalui publikasi APB dan realisasi. Namun, transparansi substantif masih membutuhkan penguatan dalam bentuk sosialisasi, komunikasi, akses informasi yang lebih aktif, serta pemanfaatan media digital. Temuan ini penting karena transparansi dalam Good Governance tidak hanya berarti bahwa informasi tersedia, tetapi juga bahwa informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

4.10. Partisipasi masyarakat dan fungsi pengawasan

Perspektif BPD menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan. P6 menjelaskan:

Anggota BPD menjelaskan perannya dalam pengawasan pemerintahan negeri: “Saya terlibat sebagai anggota BPD dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Negeri.” (P6). Ia juga menyatakan bahwa tanggung jawabnya mencakup “pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat” (P6). Keterangan ini menunjukkan bahwa BPD melihat penerapan SISKEUDES terutama dari sisi hasil administrasi, pertanggungjawaban, dan keterbukaan informasi, bukan dari pengoperasian teknis aplikasi.

Temuan tersebut menunjukkan adanya mekanisme partisipasi masyarakat terutama melalui proses perencanaan dan Musrenbang. Namun, terdapat perbedaan antara partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pengawasan realisasi keuangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih terlihat pada saat penyusunan program, sementara akses terhadap informasi realisasi dan penggunaan Dana Desa secara berkelanjutan masih perlu diperkuat.

Dalam perspektif Good Governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi mekanisme pengawasan publik yang berkelanjutan.

4.11. Analisis berdasarkan Delone & Mclean

Temuan penelitian dapat dianalisis menggunakan DeLone and McLean Information Systems Success Model.

Dalam penelitian ini, SISKEUDES menunjukkan manfaat terutama pada:

1. pengelolaan data keuangan;
2. penyimpanan dokumen;
3. penatausahaan;
4. penyusunan laporan; dan
5. keteraturan administrasi.

Pernyataan P2 mengenai kemudahan pencarian dokumen digital dan P5 mengenai peningkatan kemampuan setelah pelatihan menunjukkan bahwa sistem memberikan manfaat nyata bagi pengguna internal. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya berkembang pada sisi publik. Masyarakat P7 dan P8 bahkan belum mengetahui atau belum memperoleh sosialisasi mengenai SISKEUDES. Dengan demikian, penelitian menemukan suatu pola yaitu keberhasilan SISKEUDES pada administrasi internal lebih kuat dibandingkan pemanfaatannya sebagai instrumen transparansi publik. Hal tersebut menjadi pengembangan

penting dari pemahaman mengenai keberhasilan sistem informasi. Sistem dapat memberikan manfaat bagi pengguna internal, tetapi manfaat tersebut belum tentu otomatis menghasilkan keterbukaan informasi bagi pengguna eksternal.

4.12. Analisis berdasarkan *Good Governance*

Dalam perspektif Good Governance, hasil penelitian menunjukkan dua kondisi yang berjalan bersamaan. Pertama, akuntabilitas administratif relatif telah terbentuk.

Hal ini ditunjukkan oleh:

- Pembagian tugas;
- Prosedur pengelolaan keuangan;
- Penggunaan siskeudes;
- Pencatatan dan penginputan;
- Pemeriksaan dokumen;
- Penyusunan laporan;
- Publikasi apb dan realisasi.

Kedua, transparansi publik masih perlu diperkuat. Hal ini terlihat dari:

- Masyarakat belum seluruhnya mengetahui SISKEUDES;
- Sosialisasi belum optimal;
- Akses informasi rinci masih terbatas;
- Publikasi masih dominan melalui media konvensional;
- Partisipasi masyarakat lebih kuat pada tahap perencanaan dibandingkan pengawasan realisasi.

Dengan demikian, Good Governance di Negeri Kailolo dapat dipahami sebagai proses yang sudah memiliki fondasi administratif, tetapi masih membutuhkan penguatan pada dimensi transparansi dan partisipasi publik.

4.13. Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian menemukan bahwa transformasi digital pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo berlangsung secara tidak merata pada seluruh dimensi tata kelola. Pada sisi internal, kompetensi aparatur, pengalaman, pelatihan, dan literasi digital mendukung penggunaan SISKEUDES. Sistem membantu proses administrasi, penyimpanan dokumen, penatausahaan, dan pelaporan. Pada sisi eksternal, pemerintah negeri telah menyediakan informasi APB dan realisasi melalui media publik. Akan tetapi, masyarakat belum seluruhnya mengetahui SISKEUDES dan belum sepenuhnya memperoleh informasi keuangan secara aktif dan rinci.

4.14. Temuan Utama dan Kontribusi Penelitian

Temuan utama penelitian bukan bahwa SISKEUDES gagal diterapkan. Sebaliknya, SISKEUDES telah digunakan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan administrasi keuangan. Kontribusi penelitian terletak pada ditemukannya kesenjangan antara digitalisasi administrasi internal dan transparansi publik. Secara sederhana:

Sintesis peneliti atas temuan tersebut adalah bahwa SISKEUDES telah mendukung digitalisasi proses administrasi, sementara pengembangan digitalisasi informasi publik belum berlangsung pada tingkat yang sama. Kalimat ini merupakan rumusan analitis peneliti, bukan kutipan langsung dari informan.

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan desa tidak cukup diukur dari penggunaan aplikasi oleh aparatur. Transformasi digital yang lebih substantif membutuhkan kemampuan untuk mengubah informasi yang telah tersedia secara internal menjadi informasi publik yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 10 informan, observasi lapangan, dan dokumentasi pengelolaan keuangan Negeri Kailolo, penelitian ini menunjukkan bahwa SISKEUDES telah diterapkan dan memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan keuangan negeri, terutama dalam proses pencatatan, penatausahaan, penyimpanan

dokumen, dan penyusunan laporan. Penerapan sistem juga didukung oleh pembagian tugas aparatur serta pengalaman dan pelatihan yang membantu meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan SISKEUDES. Namun, transformasi digital pengelolaan keuangan di Negeri Kailolo belum sepenuhnya optimal. Kompetensi SDM, literasi digital, serta kondisi jaringan internet masih menjadi faktor yang memengaruhi pemanfaatan sistem.

Kendala jaringan terutama menjadi tantangan dalam mendukung proses kerja yang bergantung pada teknologi digital. Dari aspek akuntabilitas, SISKEUDES telah membantu membentuk pengelolaan administrasi keuangan yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Ketersediaan dokumen APB Negeri dan realisasi anggaran juga menunjukkan adanya upaya pemerintah negeri dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Sementara itu, dari aspek transparansi ditemukan adanya kesenjangan antara transparansi formal dan transparansi substantif. Pemerintah Negeri Kailolo telah menyediakan informasi APB Negeri dan realisasi melalui papan atau spanduk informasi publik. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui penggunaan SISKEUDES dan belum memperoleh informasi keuangan secara menyeluruh. Dengan demikian, ketersediaan informasi secara formal belum sepenuhnya diikuti oleh akses, sosialisasi, komunikasi, dan pemahaman masyarakat. Berdasarkan perspektif DeLone dan McLean, SISKEUDES telah memberikan manfaat terutama bagi pengguna internal dalam mendukung administrasi dan pengelolaan informasi keuangan. Namun, manfaat sistem sebagai sarana informasi publik masih perlu diperkuat. Sementara berdasarkan perspektif Good Governance, tata kelola keuangan Negeri Kailolo telah memiliki dasar akuntabilitas dan transparansi, tetapi aspek keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital melalui SISKEUDES di Negeri Kailolo telah berkembang pada aspek administrasi internal, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi transparansi publik yang optimal.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (1992). Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3(1), 60–95. https://doi.org/10.1287/isre.3.1.60

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Heeks, R. (2006). Implementing and managing eGovernment: An international text. SAGE Publications.

Khasanah, U., & Rodiyah, I. (2025). Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Sumorame. Jurnal Niara, 18(2), 397–409.

Mardaw, M., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2022). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. E-JRA, 11(8), 39–46.

Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly, 36*(4), Article 101385. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurfitria, A., & Kamela, H. (2026). Tantangan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES untuk meningkatkan transparansi keuangan desa di Desa Sembung, Kabupaten Tulungagung. JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan, 8(1), 108–118.

Papra, A. S., & Inapty, B. A. (2024). Pengaruh penggunaan Siskeudes, kompetensi SDM dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan pengendalian internal sebagai variabel intervening. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8(4), 4611–4627. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2469

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Rahmawati, M. A., Krisnawati, A., Nadzah, S., Widianti, N. P., & Utomo, H. A. R. (2024). Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Sustainable Jurnal Akuntansi, 4(2), 197–210.

Sari, A. K., Wafiq, M., & Maresti, D. (2025). Analisis implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas di Nagari Guguak Sarai. Journal of Business, Finance, and Economics, 6(2), 54–59. https://doi.org/10.32585/jbfe.v6i2.7478

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

World Bank. (1992). Governance and development. World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-2094-7

Zuliati, F., Sayrani, L. P., Andaya, M. N. D., & Rene, M. O. (2025). Efektivitas aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaa keuangan keuangan desa (Studi kasus di Desa Raporendu Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende). EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 12(2), 964–979. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4562